

## **BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI (Kasus Pembinaan Sumber Daya Manusia Koperasi Di Kabupaten Bandung)**

**Yuanita Indriani**  
**Institut Manajemen Koperasi Indonesia**  
[yuanita\\_indriani@ikopin.ac.id](mailto:yuanita_indriani@ikopin.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang lokasinya sangat berdekatan dengan pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, memiliki karakteristik penduduk yang relatif sama dengan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bandung pada tahun 2017 menunjukkan pendidikan formal yang ditempuh oleh rata-rata masyarakat hanya sampai tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLP), dan kondisi lebih buruk terjadi pada sekitar 30 hingga 50 tahun lampau.

Terdapat korelasi positif antara tingginya tingkat pendidikan formal dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai dinamika dan perubahan lingkungan mikro dan makro, termasuk di dalamnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan jejaring kerjasama usaha. Dalam kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, diperlukan upaya peningkatan pengetahuan praktis berkoperasi bagi insan koperasi yang memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan formal. Karena pendidikan formal yang telah ditempuh oleh para Pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung adalah sesuatu yang telah terjadi, di lain pihak dinamika dan perubahan terus terjadi dengan sangat pesat, maka untuk mengantisipasi dan mempersiapkan SDM Koperasi, diperlukan tindakan pengayaan pengetahuan dan praktik berkoperasi yang baik dan benar melalui kegiatan bimbingan teknis.

*Output* bimbingan teknis ini adalah meningkatnya pengetahuan berkoperasi dari 81 orang Pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung, khususnya dalam mengukur potensi dan pengembangan usaha koperasi, pembukuan dan akuntansi koperasi yang terstandar dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta strategi menghantarkan manfaat tertinggi bagi anggotanya.

Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, dengan teknik penyampaian materi yang beragam yaitu ceramah, diskusi, *role playing* dan bedah kasus koperasi. Simpulan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah bahwa bimbingan teknis yang telah diselenggarakan dapat dikatakan efektif, hal ini terlihat hasil *post test* yang menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta bimbingan teknis. Rekomendasi yang disampaikan adalah bahwa bimbingan teknis ini selayaknya dilakukan secara terus menerus dan merupakan kesatuan dengan kegiatan pendampingan.

**Kata Kunci:** *Bimbingan Teknis, SDM Koperasi, Pengetahuan Berkoperasi*

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

**S**umber permasalahan koperasi Indonesia adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai (Nur Soetrisno, 1998). Pendapat tersebut diperkuat oleh berbagai kondisi, diantaranya adalah tingkat pendidikan formal, keterbatasan pengetahuan berkoperasi serta jejaring kerjasama dan usaha

para pelaku koperasi, yaitu Anggota, Pengurus dan Pengawas.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang lokasinya sangat berdekatan dengan pusat pemerintahan dan ibu Kota Provinsi Jawa Barat, memiliki karakteristik penduduk yang relatif sama dengan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, hal ini ditunjukkan oleh angka partisipasi kasar (APK) masyarakat Kabupaten

Bandung yang sekolah hingga tingkat SMU pada tahun 2019 hanya mencapai angka 73,57 persen, sedangkan jika angka tersebut dikaitkan dengan APK tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan SMP mencapai 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 27 persen penduduk di kabupaten Bandung tidak melanjutkan studi hingga jenjang SMU.

Keragaan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan membandingkan APK SMU pada tahun 2019 yaitu sebesar 73,57 persen dengan data pada tahun 2011 yang hanya mencapai angka 52,97 persen; yang berarti terdapat peningkatan sekitar 21 persen dalam kurun waktu 8 tahun. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun demikian, APK ini menggambar tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Bandung masih sangat rendah. Jika APK dikaitkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Bandung pada tahun 2017 yang mencapai angka 8,51 dan jika dibandingkan dengan RLS pada tahun 2011 hanya mencapai angka 7,98, berarti ada peningkatan sekitar 1,5 persen dalam kurun waktu 7 tahun.

RLS menunjukkan bahwa pendidikan formal yang ditempuh oleh rata-rata masyarakat Kabupaten Bandung pada tahun 2017 hanya sampai tingkat SLP, kondisi lebih buruk terjadi pada sekitar 30 hingga 50 tahun lampau, di mana RLS orang-orang yang kini terlibat sebagai Anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi hanya berkisar 7 hingga 8 tahun, artinya mereka menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SLP.

Hipotesis yang diajukan atas fenomena yang terjadi adalah bahwa tingkat pendidikan formal Anggota, Pengurus dan Pengawas akan memengaruhi keragaan dan kinerja koperasi, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik keragaan dan kinerja koperasinya. Tingginya tingkat pendidikan formal berkorelasi positif dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai

dinamika dan perubahan lingkungan mikro dan makro, termasuk di dalamnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan jejaring kerjasama usaha. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan pengetahuan berkoperasi untuk melengkapi pengalaman berkoperasi para insan koperasi yang memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan formalnya.

Karena pendidikan formal yang telah ditempuh oleh para Pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung adalah sesuatu yang telah terjadi, di lain pihak dinamika dan perubahan terus berlangsung dan berkembang dengan sangat pesat, maka untuk mengantisipasi dan mempersiapkan SDM Koperasi dalam hal ini Anggota, Pengurus dan Pengawas, diperlukan tindakan yang bersifat pengayaan pengetahuan dan praktik berkoperasi yang baik dan benar melalui kegiatan bimbingan teknis.

### **Permasalahan Koperasi di Kabupaten Bandung**

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan bimbingan teknis, diperlukan identifikasi dari permasalahan yang terkait dengan keragaan Koperasi di Kabupaten Bandung, yang akhirnya akan dikerucutkan menjadi permasalahan SDM koperasi. Gambaran permasalahan koperasi di Kabupaten Bandung secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kompetensi SDM rendah;
- 2) Kekuatan modal terbatas;
- 3) Koperasi di bidang pertanian menghadapi masalah regenerasi dan ketersediaan lahan hijau (terjadi pergeseran peruntukan lahan);
- 4) Partisipasi anggota rendah;
- 5) Tingginya kredit macet;
- 6) Dampak COVID-19 usaha macet;

### ***Training Need Assessment***

Identifikasi terhadap kebutuhan pembinaan dari koperasi yang akan mengikuti bimbingan

teknis ini secara umum terbagi atas permasalahan:

- 1) Permasalahan Kelembagaan;
- 2) Permasalahan Usaha;
- 3) Permasalahan Keuangan.

Hasil temuan mengenai permasalahan koperasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya Pengurus Koperasi tidak menyadari bahwa koperasinya bermasalah, namun jika pertanyaan dilanjutkan maka muncul permasalahan yang pertama diidentifikasi oleh para Pengurus adalah masalah permodalan yang terbatas, diikuti dengan system pencatatan transaksi dan aplikasi system akuntansi yang belum dilaksanakan dengan baik.
- 2) Jika pernyataan pada butir 1) di atas dilanjutkan maka muncul permasalahan usaha yang kurang diminati anggota, dalam arti anggota tidak berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan koperasi, dengan alasan bahwa harga di koperasi tinggi, karena koperasi tidak mampu mencari barang dengan harga yang lebih rendah.
- 3) Jika keragaan usaha dikaitkan dengan kesesuaian kebutuhan anggota dengan layanan usaha koperasi maka permasalahan kelembagaan mulai muncul, dalam hal ini pelaksanaan RAT tidak optimal, anggota tidak berpartisipasi aktif dalam RAT dan tidak mampu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya agar dapat dipenuhi oleh koperasi.

Gambaran identifikasi kebutuhan pembinaan dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Pembinaan Koperasi**

### **Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Koperasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengayaan pengetahuan Pengurus Koperasi agar mampu beradaptasi dalam mengelola koperasi sejalan dengan perubahan peraturan perundangan, tuntutan anggota yang merupakan akibat dari perubahan dan pergeseran gaya hidup berbasis teknologi informasi.

### **Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan daya saing koperasi Kabupaten Bandung agar tetap bertahan bahkan dapat terus mengembangkan usahanya dalam memenuhi kebutuhan anggota.

### **Output Bimbingan Teknis**

*Output* bimbingan teknis ini adalah meningkatnya pengetahuan 81 orang Pengurus dan Pengawas Koperasi di Kabupaten Bandung, khususnya dalam pengetahuan berkoperasi, mengukur potensi usaha dan pengembangan koperasi, melaksanakan pembukuan dan akuntansi koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghantarkan manfaat tertinggi bagi anggotanya.

### **Outcome**

Beberapa *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki koperasi binaan yang keragaannya teridentifikasi dengan baik (kelembagaan, usaha, keuangan dan manfaat koperasi bagi anggotanya);
- Koperasi memiliki *cooperative education path*, pembinaan tidak tumpang tindih dan berhasil guna;
- Hasil pembinaan terstandar

## II. METODE

Untuk meningkatkan efektivitas bimbingan teknis ini, perlu ditetapkan kriteria peserta sebagai berikut:

- a. Peserta adalah pengurus koperasi (disarankan bendahara)
- b. Batasan kelas dasar dan kelas lanjutan harus sangat jelas;

### Pengorganisasian Peserta

- Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis ini adalah 81 orang Pengurus dan Pengawas Koperasi.
- Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis, seluruh peserta diorganisasikan ke dalam dua kelas yang pembagiannya didasarkan pada penguasaan substansi dan praktik masing-masing peserta dalam mengurus koperasi. Dengan demikian kelas dapat dibedakan atas keragaan peserta berdasarkan pengalamannya dalam mengurus koperasi, yaitu kelas dasar dan kelas lanjutan.
- Koperasi yang menjadi sasaran dalam kegiatan bimbingan teknis ini adalah: koperasi produsen, koperasi Produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi konsumen yang perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung.

### Pengukuran Aktivitas Bimbingan Teknis

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan bimbingan teknis, dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- a. Kontrak belajar, untuk meningkatkan keseriusan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis.
- b. Pelaksanaan *Pre Test* dan *Post Test* digunakan sebagai salah satu indikator capaian pembelajaran dalam Bimtek
- c. Metode Bimtek dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, dengan teknik penyampaian materi yang beragam yaitu ceramah, diskusi, *role playing* dan bedah kasus koperasi.



Gambar Sesi Pemaparan Materi

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini terlebih dahulu dibuat rancangan kurikulumnya. Karena tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Pengurus Koperasi dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi, maka substansi materi Bimbingan teknis diformulasikan sebagai berikut:

- a. Materi pengantar;
  - b. Materi inti;
  - c. Materi penunjang;
  - d. *Pre Test* dan *Post Test*.
- 1) Materi Pengantar

Tujuan pemberian materi pengantar adalah agar Peserta memahami:

- a. Arah gerak kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Bandung dan bagaimana perannya sebagai pengurus;
- b. Mengapa koperasi sebagai badan usaha memerlukan laporan keuangan
- c. Manfaat laporan keuangan;
- d. Bagaimana seharusnya koperasi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan jatidiri koperasi.

## 2) Materi Inti

Tujuan pemberian materi inti adalah agar Peserta memahami:

- a. Kondisi prasyarat untuk membuat laporan keuangan;
- b. Bagaimana mengidentifikasi dan membandingkan laporan keuangan

koperasi yang baik atau tidak baik, laporan yang benar atau tidak benar;

- c. Bagaimana membuat laporan keuangan koperasi yang baik dan benar dan terstandar;
- d. Praktik penyusunan laporan keuangan koperasi yang baik dan benar;

## 3) Materi Penunjang

Tujuan pemberian materi penunjang adalah agar peserta dapat:

- a. Menggunakan teknologi pada penyusunan laporan keuangan koperasi;
- b. Membaca laporan keuangan;
- c. Membaca critical point pada laporan keuangan;
- d. Menemukanali permasalahan dan menetapkan solusi dalam penyusunan laporan keuangan koperasi

## Materi Bimbingan Teknis

Kelas Dasar	Kelas Lanjutan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi pengantar</li> <li>• Materi inti (bedah laporan keuangan aktual dan proyeksi perbaikannya, pendampingan)</li> <li>• Materi penunjang (pengenalan it)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi pengantar</li> <li>• Bedah laporan keuangan aktual dan proyeksi perbaikannya, pendampingan)</li> <li>• Bedah aplikasi yang digunakan dan proyeksi penyempurnaannya</li> </ul>

## Hasil Bimbingan Teknis

Kelas Dasar	Kelas Lanjutan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta mampu mengidentifikasi kekurangan/kelemahan laporan keuangannya;</li> <li>• Peserta mampu memperbaiki laporan keuangan menjadi baik, benar dan terstandar;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta mampu mengidentifikasi kekurangan/kelemahan laporan keuangannya;</li> <li>• Peserta mampu memperbaiki laporan keuangan menjadi lebih baik, benar dan terstandar</li> </ul>

## Sertifikasi

Cakupan substansi dalam sertifikasi:

1. Penguasaan terhadap substansi Bimtek (identifikasi kekurangan laporan, memperbaiki, menyusun, membaca dan mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan)

2. Aplikasi hasil Bimtek (perubahan sebelum dan setelah mengikuti Bimtek)

3. Sertifikasi dikeluarkan oleh LPPM-Ikopin

#### IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

##### Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah bahwa:

1. Kegiatan bimbingan teknis ini telah diselenggarakan secara efektif, hal ini ditunjukkan oleh hasil penilaian terhadap capaian pembelajaran dan hasil *post test*.
2. Pengurus Koperasi sangat membutuhkan kegiatan bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi, oleh karena itu identifikasi kebutuhan bimbingan teknis (*coaching need assessment*) sebelum pelaksanaan bimbingan teknis.
3. Kegiatan bimbingan teknis tidak dapat dilakukan secara generic, karena

kebutuhan masing-masing koperasi sangat beragam, oleh karenanya diperlukan identifikasi keragaan kelembagaan dan usaha koperasi peserta Bimtek.

##### Saran

1. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pengurus Koperasi melalui pelaksanaan bimbingan teknis perlu dilakukan secara berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan tindakan penguatan yang memiliki tujuan yang jelas, oleh karena itu diperlukan data base kegiatan penguatan yang komprehensif sebagai dasar untuk menentukan berbagai kegiatan atau program penguatan;
2. Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan bimbingan teknis, perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan pendampingan.

##### BIBLIOGRAFI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992.

Allison Rossett, Training Need Assessment, 1987, Educational Technology Publication, Engelwood Cliffs, New Jersey 07632.

Noer Soetrisno, Rekonstruksi Pemahaman Koperasi: Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat, 2001, Gramedia, Jakarta.

Noer Soetrisno, Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial, 2003, Gramedia, Jakarta